

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berlandaskan prinsip yaitu transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabilitas dan berkelanjutan, yang berguna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah, pendistribusian belanja modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Belanja Modal juga berpengaruh terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Belanja Modal akan menambah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang merupakan syarat utama untuk memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Belanja Modal juga merupakan salah satu pengeluaran pada pemerintah daerah yang jumlahnya cukup besar, oleh karena itu di setiap pemerintah daerah memerlukan sistem dan prosedur yang baik dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan bagi pemerintah daerah.

Untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien di perlukan sistem yang baik pada suatu pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu sebuah rangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem Akuntansi Pemerintah ini dirancang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi tersebut menjadi kebutuhan setiap Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelola keuangan pemerintah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor adalah salah satu instansi yang setiap tahunnya merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan APBD berguna untuk berjalannya kegiatan atau program kerja pada tahun tertentu yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pada Dinas KukmDagin Kota Bogor. Pelaksanaan anggaran didasarkan oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), mengenai anggaran tahunan tersebut di peruntukan sebagai belanja diantaranya Belanja Modal yang mana belanja modal termasuk ke dalam pengeluaran yang jumlahnya cukup besar. Di dalam pelaksanaan Belanja Modal terdapat metode Pengadaan Langsung dimana pada Dinas KukmDagin Kota Bogor menggunakan metode tersebut. Pengadaan langsung ini bisa dengan cara pembelian langsung dan juga menggunakan aplikasi LPSE. Metode pengadaan langsung adalah metode yang prosesnya cepat dan tidak membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu Dinas KukmDagin Kota



Bogor melaksanakan Belanja Modal dengan metode pengadaan langsung agar penggunaan anggaran bisa cepat terealisasi.

Pada pelaksanaan pengadaan langsung Dinas KukmDagin Kota Bogor ada saja kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaannya. Untuk pengadaan langsung terdapat kekurangan yang mana terjadinya kesalahan spesifikasi barang dengan apa yang dipesan. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur yang baik dalam pelaksanaannya. Dengan adanya sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, Dinas KukmDagin Kota Bogor harus mengikuti peraturan tersebut. Kemajuan sistem pengelolaan keuangan sangat berdampak pada pengelolaan perencanaan keuangan Dinas KukmDagin Kota Bogor terutama pada Belanja Modal. Sistem dan prosedur yang baik sangat membantu pelaksana ataupun pihak yang berkaitan dengan belanja modal sebagai pedoman kerja. Dengan adanya prosedur tahapan atau langkah serta bagian yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan yang lebih mudah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “**Sistem Belanja Modal Pada Dinas KukmDagin Kota Bogor**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor?
2. Apa saja Fungsi yang terkait dalam pelaksanaan belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor?
3. Apa saja Dokumen dan Catatan akuntansi yang digunakan dalam pelaksanaan belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor?
4. Bagaimana Prosedur dan Bagan Alir/*Flowchart* belanja modal pengadaan langsung pada Dinas KukmDagin Kota Bogor?
5. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan Kebijakan belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor.
2. Menguraikan Fungsi yang terkait dalam pelaksanaan belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor.
3. Menguraikan Dokumen dan Catatan Akuntansi yang digunakan dalam pelaksanaan belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor.
4. Menguraikan Prosedur dan Bagan Alir/*Flowchart* belanja modal pengadaan langsung pada Dinas KukmDagin Kota Bogor.
5. Menguraikan Sistem Pengendalian Internal belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor.

1.4 Manfaat

Manfaat penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Secara Teoritis
Laporan Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai prosedur belanja modal.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Laporan Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa khususnya terkait dengan belanja modal dan menambah bahan literatur Sekolah Vokasi IPB.
 - b. Bagi Penulis
Sebagai masukan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang prosedur belanja modal.
 - c. Bagi Instansi
Hasil penulisan Laporan Tugas akhir ini diharapkan memberikan kemudahan ataupun pertimbangan bagi instansi dalam mengambil keputusan.
 - d. Bagi Pembaca
Laporan Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai belanja modal bagi pembaca pada umumnya.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

